

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah daerah merupakan pihak yang diberikan amanat dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu adanya transparansi serta akuntabilitas agar tercipta pemerintah yang bersih dari tindakan penyimpangan. Dalam rangka menciptakan sistem dan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya yang berupa laporan keuangan (Ananda, 2021). Laporan keuangan yang disampaikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus segera disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kemudian, pemeriksa keuangan akan memberikan hasil opini. Opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer Opinion*), dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan secara keseluruhan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah pasti mengusahakan agar mendapatkan opini WTP, dan terbukti di daerah kabupaten dan kota banyak yang secara konsisten mendapatkan opini WTP dari BPK.

Laporan keuangan yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD. Dalam rangka meningkatkan partisipasi

publik dan transparansi, laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan pada lembaga perwakilan dapat terbuka untuk masyarakat umum (bpk.go.id). Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, salah satunya melalui publikasi dari situs *website* BPK dan hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang akan diaudit harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap itu diciptakan dengan menyajikan data-data krusial bagi para pemakai laporan keuangan, baik yang disampaikan pada lembar awal laporan keuangan, maupun yang disampaikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Finakesti dkk., 2022). CaLK merupakan hal yang penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta memudahkan pengguna laporan dalam memahami isi laporan keuangan (Putri & Arza, 2019). Selain itu, melalui pengungkapan diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik. Pemerintah daerah yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dapat dilihat dari hasil temuan audit BPK.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, BPK telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dari 542 Pemerintah daerah (Pemda). Dari 542 Pemda, 1 Pemda yang belum menyampaikan LKPD tahun 2021 kepada BPK untuk diperiksa, 3 Pemda memperoleh opini TMP (0,6%), 38 Pemda yang memperoleh opini WDP (7%), dan 500 Pemda yang memperoleh opini WTP (92,4%). Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 16,4%. Sedangkan, pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP, TW, dan TMP mengalami penurunan setiap tahunnya. Gambar 1.1 menunjukkan perolehan opini LKPD selama tahun anggaran 2018-2021.



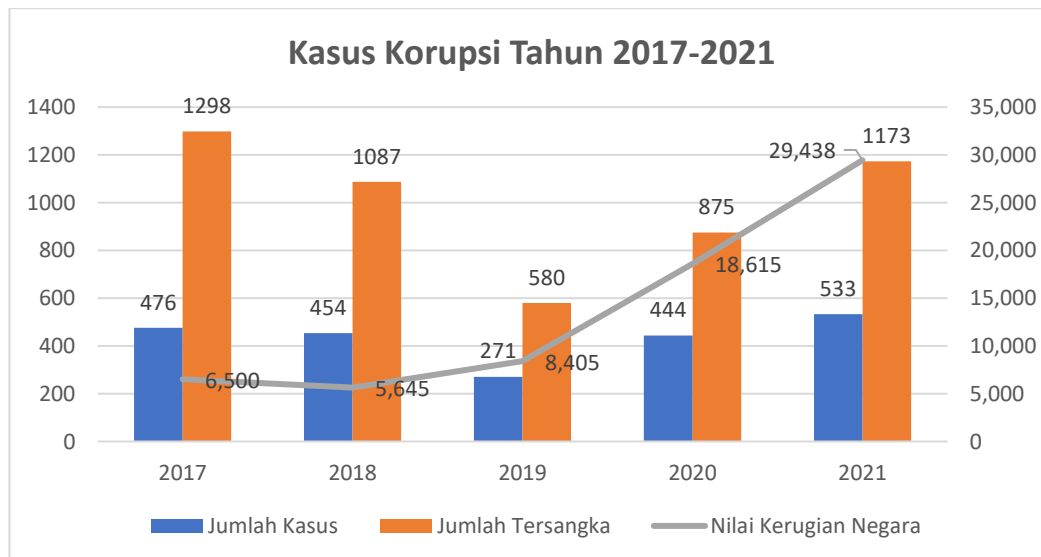
Sumber: IHPS I Tahun 2018-2022, data diolah (2023)

Gambar 1. 1
Opini LKPD Tahun Anggaran 2017-2021

Peningkatan opini WTP dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bertolak belakang dengan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK pada semester I tahun 2022. Dimana BPK mengungkapkan terdapat 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya sebanyak 5.366 terkait kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri dari 1.637 terkait kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.791 terkait kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 938 terkait kelemahan pengendalian struktur intern, kemudian sebanyak 6.544 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan total kerugian sebesar Rp2,35 triliun yang terdiri dari 2.020 permasalahan terkait penyimpangan administrasi dan 4.524 permasalahan terkait ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,45 triliun, potensi kerugian sebesar Rp371,21 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp534,76 miliar.

Menurut Primayogha (2022), opini WTP dari BPK tidak menjamin sebuah wilayah terbebas dari kasus korupsi karena opini WTP dapat diperjualbelikan. Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) penindakan kasus korupsi yang dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan. Sementara, nilai kerugian negara semakin meningkat tiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2021 ICW

mencatat setidaknya 533 kasus korupsi dengan 1.173 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka serta potensi kerugian negaranya mencapai Rp29,438 triliun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini:



Sumber: ICW 2017-2021, data diolah (2023)

Gambar 1. 2
Kasus Korupsi Tahun 2017-2021

Lembaga terbanyak yang menjadi tempat korupsi yaitu pemerintah daerah dalam penyalahgunaan anggaran. Seharusnya pemerintah yang telah memperoleh opini WTP terbebas dari salah saji material pada pengungkapan laporan keuangannya. Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 36,23% (Veranti, 2018). Hal ini dapat diartikan bahwa pengungkapan yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SAP yang berlaku.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia yaitu aset, semakin banyak aset yang dimiliki maka semakin luas pengungkapan yang dilakukan (Budiarto & Indarti, 2019). Dalam penelitian Salfadhilah dkk. (2021) menyatakan bahwa total aset berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Cheisviyanny (2022) menyatakan bahwa total aset tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Semakin banyak anggaran yang dikeluarkan untuk belanja modal, semakin mendorong pengelola pemerintah daerah untuk melakukan keterbukaan informasi pada laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada masyarakat (Fatwa Amaliah, 2019). Dalam penelitian Fatwa Amaliah (2019) & Fasa dkk. (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Indeks pembangunan manusia menjadi tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat (Utami & Sulardi, 2019). Semakin tinggi indeks pembangunan masyarakat, maka semakin tinggi tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan yang rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (Dianti & Herawati, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Sulardi (2019) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan, dalam penelitian Najah (2019) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Opini audit juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Semakin baik opini atas laporan keuangan, maka semakin baik pula laporan keuangan tersebut. Opini audit yang baik menggambarkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik (Putri & Arza, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan Naopal dkk. (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan, dalam penelitian Putri & Arza (2019) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan fenomena mengenai kasus korupsi di Indonesia, pemerintah tingkat daerah menjadi tempat terbanyak terjadinya kasus korupsi dan ketidakkonsistenan temuan peneliti terdahulu mendorong penulis untuk menguji kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan

pemerintah tingkat kabupaten dan kota sebagai objek penelitian. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aset, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Aset berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Aset, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membutuhkan batasan masalah agar pembahasan dapat terarah dan sesuai dengan permasalahan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek pada penelitian ini menggunakan 13 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh Aset, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Opini BPK per Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini menggunakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2022 yang diperoleh dari *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021 yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Penulis ini menggunakan item pengungkapan wajib pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 05 sampai dengan PSAP 09.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Aset secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Aset, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Opini Audi secara simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik dan dapat memberikan saran pemikiran dalam melihat gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai dan memahami akuntansi sektor publik dan informasi tersebut dapat menjadi saran kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran.